

Membangun Inkubator Bisnis bagi UMKM di Hulu Sungai Selatan

Oleh :

Herry Pradana, MBA, H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum,
Hairul Ikhwan, S.Hut. Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian.

Pemerintah Daerah sebaiknya berpihak dan fokus kepada para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha.



Pada dasarnya UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM.

UMKM juga menjadi pasar potensial bagi industri jasa keuangan. Di sisi lain UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit yang besar.

Kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan pola pembinaan UMKM dalam Inkubator Bisnis.

RINGKASAN

UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Hulu Sungai Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, lebih khusus dalam pola pengembangan Inkubator Bisnis. Inkubator bisnis dapat selaras dengan peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan bisnis baru.

Inkubator bisnis dapat dianggap sebagai strategi pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses pembentukan, pengembangan, dan kemampuan bertahan hidup dari perusahaan baru dan yang sudah ada di masyarakat.

Ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya potensial termasuk bisnis potensial dari masyarakat dalam fasilitas inkubator bisnis dan kemudian menyediakan dengan berbagai layanan bantuan bisnis. Program ini mendukung usaha pemula, dengan bimbingan dan penyediaan ruang untuk mengembangkan ide.

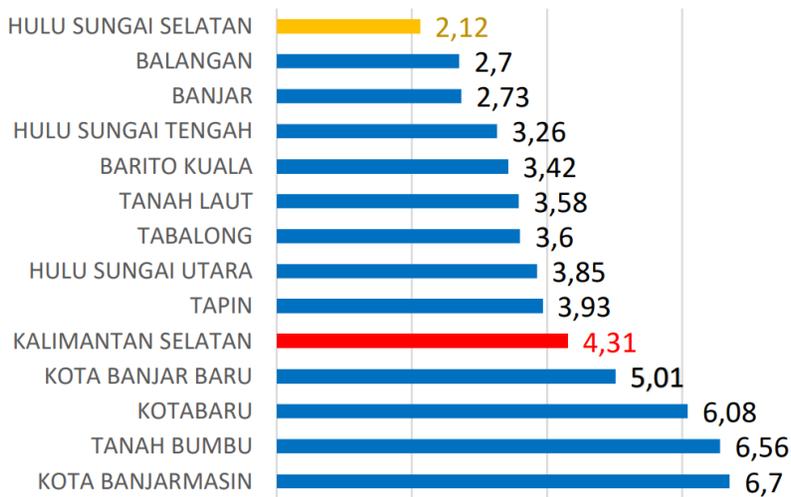
ada beberapa langkah yang dapat diambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam optimalisasi pembinaan bagi UMKM :

- Melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pola pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah saat ini yang masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar.
- Melakukan kolaborasi terpadu lintas sektor dalam pengembangan pola Inkubator Bisnis bagi UMKM di HSS dengan memilih fokus pada penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dan UMKM Naik Kelas (Scale Up), serta memilih Adopsi Model Inkubasi milik Pemerintah Daerah lain (Intenss, Inwinov, Kawal Incubator), atau Kolaborasi dengan Pihak ketiga
- Membentuk Tim Teknis dalam pelaksanaan Inkubator Bisnis dengan SK Kepala Daerah melibatkan lintas Perangkat Daerah dan stakeholder lain.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, lebih khusus dalam pola pengembangan Inkubator Bisnis. Inkubator bisnis dapat selaras dengan peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan bisnis baru.

TPT Kab di Kalimantan Selatan Tahun 2023 (%)



Pengangguran Terendah ke-1

Tingkat pengangguran di Kab. HSS **relatif rendah** dibandingkan Kab Lain di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan penduduk HSS dominan bekerja di **sektor pertanian** yang relatif lebih tersedia peluang kerjanya.



UMKM Formal di Kab. HSS



UMKM Informal di Kab. HSS



Walaupun pengangguran di Kab. HSS sudah rendah, namun masalah ini akan semakin mudah ditangani dan juga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran UMKM.

Kalau dilihat dari jumlah dan serapan tenaga kerja pada 3 jenis klasifikasi UMKM terbesar di HSS maka ini menjadi modal utama dalam pengembangan.

Penting untuk memastikan bahwa jenis pekerjaan yang diciptakan dalam suatu ekonomi cocok dengan keterampilan dan harapan para penganggur. Inkubator bisnis, membantu bisnis baru memulai, semua sumber daya yang diperlukan atau dukungan yang dibutuhkan perusahaan baru untuk berkembang dan tumbuh sebagai bisnis yang matang.

Inkubator bisnis adalah istilah umum yang merujuk pada organisasi atau pengusaha muda mana pun yang menyediakan ruang kerja fisik, bantuan manajemen, akses ke pembiayaan dan layanan pendukung teknis dan lainnya kepada wirausaha muda dan membantu mereka bertahan dan tumbuh selama tahap awal

Inkubator bisnis dapat dianggap sebagai strategi pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses pembentukan, pengembangan, dan kemampuan bertahan hidup dari perusahaan baru dan yang sudah ada di masyarakat. Ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya potensial termasuk bisnis potensial dari masyarakat dalam fasilitas inkubator bisnis dan kemudian menyediakan dengan berbagai layanan bantuan bisnis. Program ini mendukung usaha pemula, dengan bimbingan dan penyediaan ruang untuk mengembangkan ide. Pembinaan melalui program inkubator bisnis akan berjalan selama beberapa waktu seperti satu sampai dua tahun.

Pola pembinaan UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah lumayan banyak dan juga sudah dilakukan dukungan oleh Perangkat Daerah lain dan *stakeholder*. Namun ada beberapa hal yang masih ada kelemahannya, antara lain : pelatihan yang dilakukan cenderung fokus pada indikator normatif, seperti “terlaksananya kegiatan pelatihan” bukan pada outcome teknis seperti peningkatan omset & keuntungan, keterampilan promosi pada medsos, naiknya engagement pada media sosial. Durasi pelatihan juga sangat terbatas, dan peserta diharapkan menjadi terampil setelah pelatihan selesai. Tidak adanya pendampingan secara langsung yang diberikan kepada Pelaku UMKM dan IKM karena cenderung hanya berinteraksi dengan pemateri disaat acara berlangsung.

Tidak adanya seleksi peserta pelatihan juga seringkali menjadi masalah tersendiri, dimana Pemerintah Daerah membuat program pelatihan yang sudah cukup baik, namun menggabungkan semua UMKM/IKM dalam satu ruangan, dimana ada perbedaan mendasar mengenai jenis usaha, kelas usaha, model bisnis, dan sektor usaha. Hal ini menjadikan materi yang telah disusun dengan baik, menjadi tidak optimal, dikarenakan setiap sektor usaha memiliki keunikan dan problematika nya masing-masing, sehingga tidak dapat disamaratakan.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah juga telah melakukan berbagai hal untuk mengoptimalkan pelatihan yang telah disusun dalam program dan kegiatan mereka. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah secara umum sudah mulai mengadopsi pola pelatihan dengan indikator yang jelas seperti pendampingan Merek, Sertifikasi Halal, Pelatihan Legalitas Usaha. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, jenis pelatihan-pelatihan tersebut, lebih banyak berfokus pada output yang riil, dan dapat diukur dengan sebuah dokumen, misalnya dokumen legalitas, sertifikasi halal, dan pengakuan Hak atas Merek yang diajukan. Disisi lain, ketika dihadapkan dengan Outcome yang sifatnya penumbuhkembangan usaha, peningkatan omset dan/atau keuntungan usaha, tingkat penjualan di media sosial, tingkat engagement pada media promosi yang digunakan, dan hal-hal terkait indikator usaha kongkrit, seringkali Pemerintah Daerah kewalahan dalam mewujudkannya.

Berdasarkan permasalahan mendasar diatas, perlu adanya Inovasi yang tepat dan langkah progresif dalam hal mentransformasi sistim pelatihan dan pendampingan UMKM dan IKM oleh Pemerintah Daerah. Pola pendampingan a la Lembaga Inkubator dapat menjadi alternatif yang telah teruji yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Fokus Inkubasi

Tanpa Fokus Inkubasi yang jelas, Inkubator Bisnis tidak dapat bekerja secara optimal dan beroperasi secara multi-years

-  Penciptaan Wirausaha Baru (WUB)
-  UMKM / IKM Naik Kelas (Scale Up)
-  UMKM / IKM Orientasi Ekspor
-  Penciptaan Ekosistem Usaha yang Kondusif untuk UMKM (Model Jakarta Creative Hub)
-  Penciptaan Perusahaan Rintis/Pemula Berbasis Teknologi (Startups)



Atas dasar inilah Inkubator Bisnis bisa menjadi pilihan kebijakan kedepan. Ada beberapa fokus proses inkubasi. Adapun untuk tahapan awal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setidaknya fokus pada penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dan UMKM Naik Kelas (Scale Up).

Ada beberapa pola dan model inkubasi yang dapat dijadikan acuan dalam hal adopsi dan adaptasi pola inkubasi yang cocok untuk diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diantaranya: Model Jakpreneur, Model Inkubasi berorientasi Ekspor, Adopsi Model Inkubasi milik Pemerintah Daerah lain (Intenss, Inwinov, Kawal Incubator, Kolaborasi dengan Pihak ketiga

Alternatif Model Inkubasi untuk Pemkab HSS



Model Jakpreneur

- Jakpreneur sebagai platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusipendidikan, maupun institusi pembiayaan.
- Program 7P (Pendaftaran, Pelatihan Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan &Permodalan



Model Inkubasi berorientasi Ekspor

- Inkubator Bisnis sebagai Trading Host atau Trading House
- Trading Host atau Trading House adalah sebuah konsep “rumah dagang” bersama yang berfungsi sebagai Hub atau Sarana perdagangan (commercial intermediaries), agregator dan konsolidator pemasaran produk UMKM-IKM dengan fokus pasar internasional.



Adopsi Model Intenss, Inwinov, Kawal Incubator

Inkubator milik pemerintah, dengan pola pendampingan terbatas (kurang dari 10 tenants pertahun), penganggaran rigid, fokus pada pendampingan peserta lomba inovasi & UMKM/IKM Unggul



Kolaborasi dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan Wetland Box Incubator sebagai mitra Pemkab HSS dalam penyediaan layanan Inkubasi, (Pendampingan, Pelatihan, Mentoring, Coaching, Scaling Up)

Secara umum kurikulum dan program inkubasi dibagi 3 tahapan besar; rekrutmen, pra inkubasi dan pasca inkubasi. Pada tahapan rekrutmen, dimulai dengan acara seminar kewirausahaan dan inkubasi bisnis dengan mengundang para pelaku usaha, komunitas, teknokrat, akademisi, dan media massa. Pada acara ini dilaksanakan kickoff kegiatan sekaligus launching program inkubasi.

Proses rekrutmen kemudian dilanjutkan dengan publikasi dan promosi menggunakan media massa, radio, dan media sosial. Setelah periode rekrutmen telah dilewati, selanjutnya adalah proses seleksi tenant / peserta, dimana harus disepakati dasar pemilihan pelaku usaha untuk masuk kedalam inkubasi.

Adapun beberapa kriteria yang dapat dipakai adalah sebagai berikut: Lama berusaha atau lama usaha, Jenis produk atau layanan, Kelas usaha, Omset, dan modal awal, Usia pelaku usaha, Kondisi usaha utama yang dijalankan, dan hal-hal relevan lainnya.

Pada fase Pra Inkubasi, Lembaga Inkubator akan menyiapkan prasyarat usaha tenant agar dapat memulai usahanya dengan lancar. Beberapa prasyarat usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut: Legalitas usaha, Logo produk atau logo usaha, Foto produk, Akses ke marketplace, dan Akses ke toko online (di media sosial).

Pada tahapan Inkubasi utama, peserta Inkubasi akan mendapatkan banyak ilmu, fasilitasi, pendampingan, mentoring dan coaching one-on-one dari tim dari Lembaga Inkubator.

Pada tahap akhir yaitu pasca inkubasi, peserta akan terus diberikan fasilitasi, terutama pada fasilitasi pemasaran, akses keacara-acara Pemerintah Daerah, bantuan untuk mendapatkan akses permodalan, dan keikutsertaan pada kompetisi Inovasi dan UMKM skala Lokal dan Nasional.

Inkubator Bisnis ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya. Pada kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dapat juga didukung oleh PT. Antang Gunung Meratus dan Perusahaan lainnya serta Perbankan seperti Bank Kalsel dan BRI. Peluang Kerjasama juga dapat dilakukan dengan Wetland Box (WLB) yang merupakan incubator bisnis di bawah naungan Yayasan Hasnur Center.

Program inkubator bisnis ini pada dasarnya sangat membantu perbankan dalam menjaga kelancaran kredit bagi UMKM, agar rasio kredit macet atau *non performing loan* (NPL) kecil. Hal ini juga menjadi penting Ketika Pemerintah Hulu Sungai Selatan baru memulai program yang disebut Bunga Numasera, atau Pinjaman Tanpa Bunga untuk meningkatkan ekonomi UMKM bekerjasama dengan Bank Kalsel.

Rekomendasi Kebijakan

Dari analisa kondisi dan paparan diatas setidaknya ada beberapa langkah yang dapat diambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam optimalisasi pembinaan bagi UMKM :

- a. Melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pola pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah saat ini yang masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar, seperti kurangnya monitoring, komunikasi serta feedback antara mentor dan peserta pelatihan dan pendampingan langsung (one-on-one coaching). Tidak disusunnya kurikulum pelatihan yang sifatnya tailor made, atau dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- b. Melakukan kolaborasi terpadu lintas sektor dalam pengembangan pola Inkubator Bisnis bagi UMKM di HSS dengan memilih fokus pada penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dan UMKM Naik Kelas (Scale Up), serta memilih Adopsi Model Inkubasi milik Pemerintah Daerah lain (Intenss, Inwinov, Kawal Incubator), atau Kolaborasi dengan Pihak ketiga
- c. Membentuk Tim Teknis dalam pelaksanaan Inkubator Bisnis dengan SK Kepala Daerah melibatkan lintas Perangkat Daerah dan stakeholder lain.